

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IV huruf B Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banjarnegara merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Pasal 4

Ketentuan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 91 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal

BUPATI BANJARNEGARA

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 83 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Nama : Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
- Organisasi
- Tugas : 1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Wewenang : 1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TERTIB, AMAN, DAMAI DAN DEMOKRATIS

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kondusivitas wilayah			
1	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	1. Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat ketentraman, ketertiban dan keamanan di lingkungan Kabupaten banjarnegara Formulasi Pengukuran : Rasio anggota Linmas per Rukun Tetangga (RT) x 10% + penegakan perda x 25% + .prosentase penurunan konflik masyarakat x 15% + prosentase penurunan konflik agama x 25% + prosentase penurunan angka kriminalitas x 25% Tipe Perhitungan : Satuan Polisi Pamong Praja PD Penanggung Jawab : Satuan Polisi Pamong Praja Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja
1.2	Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana			
1	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana	1. Persentase desa tangguh bencana	%	Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengetahui kekuatan/kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana Formulasi Pengukuran : Jumlah desa tangguh bencana ---x 100 Jumlah desa rawan bencana Tipe Perhitungan : Komulatif PD Penanggung Jawab : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.3	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi			
1	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	1. Indeks Kebudayaan	Angka	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih Untuk mengetahui pelestarian dan pengembangan budaya Formulasi Pengukuran : % peninngkatan event kesenian atau budaya x 35% +% cagar budaya yang terpelihara x 20% +% gedung kesenian yang aktif x 15% + % peningkatan jumlah riset unggulan daerah, inovasi yang terjaring x 30% Tipe Perhitungan : Komulatif PD Penanggung Jawab : Disparbud, Baperlitbang, dinsos Sumber Data : Disparbud, Baperlitbang, dinsos
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	2. Presentase pemilih dalam pemilu	%	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pemilu Formulasi Pengukuran : jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu ----- x 100% Jumlah daftar pemilih tetap Tipe Perhitungan : Non Komulatif PD Penanggung Jawab : Kankesbangpolinmas Sumber Data : Kankesbangpolinmas
	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	1. Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik Formulasi Pengukuran : 1/3 (indeks keterwakilan di prlemen + indeks pengambilan keputusan+indeks distribusi pendapatan Tipe Perhitungan : Komulatif PD Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan Sumber Data : Dinas Kesehatan

MISI 2 : MEWUJUDKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

2	Meningkatkan kualitas layanan publik			
1	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	1. Survy Kepuasan Masyarakat	Angka	Alasan Pemilihan Indikator Formulasi Pengukuran Tipe Perhitungan PD Penanggung Jawab Sumber Data : Indikator ini dipilih untuk mengetahui kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat : Nilai rata-rata IKM di Kabupaten Banjarnegara : Kumulatif : Sekretariat Daerah : Sekretariat Daerah
2.1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah			
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Nilai	Alasan Pemilihan Indikator Formulasi Pengukuran Tipe Perhitungan PD Penanggung Jawab Sumber Data : Indikator ini dipilih untuk mengetahui nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara : Kategori penilaian atas Dokumen SAKIP Pemerintah Kabupaten Banjarnegara : Kumulatif : Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Banjarnegara : Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Banjarnegara
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	2. Persentase peningkatan desa berkembang)	%	Alasan Pemilihan Indikator Formulasi Pengukuran Tipe Perhitungan PD Penanggung Jawab Sumber Data : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat perkembangan desa : Jumlah desa berkembang tahun n-Jumlah Desa Berkembang tahun n-1 $\frac{\text{Jumlah Desa berkembang tahun n} - \text{Jumlah Desa berkembang tahun n-1}}{\text{Jumlah Desa berkembang tahun n-1}} \times 100$: Kumulatif : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKESINAMBUNGAN DAN BERBASIS PADA PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

3.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur			
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik S	1. Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	Alasan Pemilihan Indikator Formulasi Pengukuran Tipe Perhitungan PD Penanggung Jawab Sumber Data : Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Banjarnegara : Panjang jalan dalam kondisi baik $\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100$: Kumulatif : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	2. Luas sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	Alasan Pemilihan Indikator Formulasi Pengukuran Tipe Perhitungan PD Penanggung Jawab Sumber Data : Indikator ini dipilih untuk mengetahui luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Banjarnegara : Luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik : kumulatif : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.1	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah				
1	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan	1	Pertumbuhan sektor pertanian	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Banjarnegara</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Nilai PDRB sektor pertanian tahun } n - \text{nilai PDRB Sektor pertanian } n-1}{\text{Nilai PDRB tahun } n-1} \times 100\%$</p> <p>Tipe Perhitungan : Komulatif</p> <p>PD Penanggung Jawab : Dinas Pertanian dan Perikanan</p> <p>Sumber Data : Dinas Pertanian dan Perikanan</p>
		2	Nilai Tukar Petani	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Banjarnegara</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Nilai tukar petani tahun berkeajaan} - \text{nilai tukar petani tahun lalu}}{\text{Nilai tukar petani tahun lalu}} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan : Komulatif</p> <p>PD Penanggung Jawab : Dinas Pertanian dan Perikanan</p> <p>Sumber Data : Dinas Pertanian dan Perikanan</p>
2	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	1	Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase peningkatan kunjungan wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata di Kabupaten Banjarnegara</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata di Kabupaten Banjarnegara tahun } n - \text{tahun } n-1}{\text{jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata di Kabupaten Banjarnegartahun } n-1} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan : Komulatif</p> <p>PD Penanggung Jawab : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p>
3.	Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi	1.	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui kontribusi UKM terhadap PDRB</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Akumulasi nilai tambah sektor UKM}}{\text{PDRB tahun } n} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan : Komulatif</p> <p>PD Penanggung Jawab : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p>
		2.	Persentase koperasi sehat	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator : indikator ini dipilih untuk mengetahui presentase koperasi sehat di kabupaten banjarnegara</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Koperasi sehat}}{\text{jumlah koperasi}} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan : kumulatif</p> <p>PD Penanggung Jawab : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p> <p>Sumber Data : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</p>

3.	Meningkatnya jumlah investasi	1. Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional	%	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah nilai investasi yang telah ditanamkan investor Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1}{\text{Jumlah investasi } n-1} \times 100$ Tipe Perhitungan : non kumulatif PD Penanggung Jawab : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase pengangguran terbuka Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka}}{\text{jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100$ Tipe Perhitungan : kumulatif PD Penanggung Jawab : Dinas Tenaga Kerja, BPS, Baperlitbang Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja, BPS, Baperlitbang
5.	Meningkatnya kinerja sektor industri	1. Pertumbuhan sektor industri	%	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui pertumbuhan sektor industri Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Nilai PDRB sektor industri tahun } n - \text{nilai PDRB sektor industri } n-1}{\text{Nilai PDRB Sektor industri } n-1} \times 100$ Tipe Perhitungan : kumulatif PD Penanggung Jawab : Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sumber Data : Menengah
6	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	1. Pertumbuhan sektor perdagangan	%	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui nilai pertumbuhan sektor perdagangan Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Nilai PDRB sektor industri tahun } n - \text{nilai PDRB sektor industri } n-1}{\text{Nilai PDRB sektor perdagangan } n-1} \times 100$ Tipe Perhitungan : kumulatif PD Penanggung Jawab : Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Sumber Data : Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7.	Meningkatnya produksi dan produktivitas agregat daerah	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Alasan Pemilihan Indikator : Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{PDRB tahun berkenaan} - \text{PDRB tahun sebelumnya}}{\text{PDRB tahun berkenaan}} \times 100$ Tipe Perhitungan : kumulatif PD Penanggung Jawab : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Data : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
8.	Meningkatnya stabilitas harga	1. PDRB per kapita (ADHB)	%	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$ Tipe Perhitungan : kumulatif PD Penanggung Jawab : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Data : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

9.	Meningkatnya stabilitas harga	1. Laju Inflasi	rupiah	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih Untuk mengukur stabilitas ekonomi daerah Formulasi : akumulasi inflasi dalam 1 tahun Pengukuran : kumulatif Tipe Perhitungan : kumulatif PD Penanggung Jawab : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Data :
5.	Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah			
1	Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan	1. Indeks Williamson	Angka	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengukur untuk mengetahui kesenjangan pendapatan antar wilayah Formulasi : $\frac{\text{PDRB perkapita Kecamatan}}{\text{PDRB perkapita rata-rata kabupaten}} \times \text{jumlah penduduk kecamatan} / \text{jumlah penduduk kabupaten}$ Pengukuran : Tipe Perhitungan : Komulatif PD Penanggung Jawab : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Sumber Data : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
6.	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan			
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup Formulasi : Indeks kualitas air + Indeks Kualitas Udara + Indeks tutupan lahan Pengukuran : Tipe Perhitungan : Komulatif PD Penanggung Jawab : Dinas Lingkungan Hidup Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup

MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, PRODUKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN TENAGA PROFESIONAL”

7.	Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan			
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk melihat opini BPK terhadap audit laporan keuangan daerah Formulasi : Jenis opini BPK terhadap laporan keuangan daerah Pengukuran : Tipe Perhitungan : Non Komulatif PD Penanggung Jawab : Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Sumber Data :
2	Meningkatnya kemandirian daerah	2. Rasio kemandirian keuangan daerah	%	Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui derajat fiskal daerah Formulasi : PAD Pengukuran : $\frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan daerah}} \times 100$ Tipe Perhitungan : Komulatif PD Penanggung Jawab : BPPKAD Sumber Data : BPPKAD

MISI 5 : MEWUJUDKAN KEMARTABATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN CAKUPAN PEMENUHAN HAK DASAR

8.	Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas			
1	Meningkatnya ketahanan pangan	1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\% \text{ Angka Kekucupan Gizi} \times \text{ bobot}$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>PD Penanggung Jawab : Dinas Ketahanan Pangan</p> <p>Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan</p>
2	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	1. Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase MBR yang ditempati Rumah Layak Huni di Kabupaten Banjarnegara</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah MBR yang menghuni rumah layak huni}}{\text{jumlah MBR}} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>PD Penanggung Jawab : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>
3	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih Untuk mengetahui rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk diatas usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis penddikan formal</p> <p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{jumlah penduuk usia 15 tahun keatas}}{\text{jumlah penduduk 15 tahun keatas}} \times 100$</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>PD Penanggung Jawab : Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>Sumber Data : Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p>
		2. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem penddikan di berbagai jenjang yang dapat dicapai oleh setiap anak usia sekolah</p> <p>Formulasi Pengukuran : Lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun ke atas</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>PD Penanggung Jawab : Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p> <p>Sumber Data : Dinas Kependidikan, Kepemudaan dan Olahraga</p>
4	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Angka usia harapan hidup	Tahun	<p>Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat perbaikan kesehatan dan tingkat sosial ekonomi masyarakat</p> <p>Formulasi Pengukuran : rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x dalam tahun tertentu</p> <p>Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> <p>PD Penanggung Jawab : Dinas Kesehatan</p> <p>Sumber Data : Dinas Kesehatan</p>

9.	Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial			
1	Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan	1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator Formulasi Pengukuran : Indikator ini dipilih Untuk mengetahui tingkat kemakmuran penduduk jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan -----x 100 jumlah penduduk</p> <p>Tipe Perhitungan : Komulatif</p> <p>PD Penanggung Jawab : Dinas Sosial</p> <p>Sumber Data : Dinas Sosial</p>
2	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Persentase Penurunan PMKS	%	<p>Alasan Pemilihan Indikator Formulasi Pengukuran : Indikator ini dipilih untuk mengetahui penurunan PMKS yang ada didaerah Jumlah PMKS tahun n- jumlah PMKS tahun n-1 -----x 100 Jumlah PMKS tahun n-1</p> <p>Tipe Perhitungan : Komulatif</p> <p>PD Penanggung Jawab : Dinas Sosial</p> <p>Sumber Data : Dinas Sosial</p>

BUPATI BANJARNEGARA

BUDHI SARWONO



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

JL A.YANI NOMOR 16 TELP.(0286) 591218
BANJARNEGARA 53414

Banjarnegara, Januari 2018

Nomor : Kepada
Yth. Bupati Banjarnegara
Lewat
Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat ;

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA

Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017-2022
Catatan : Keputusan ini telah dicata dan diberi nomor untuk Tahun
2017 dari Bagian Hukum dan Penysusunannya baru selesai
tanggal 15 Januari 2018
Lampiran :
Mohon untuk tanda :
tangan :
Pengesahan :
Persetujuan :

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN KESRA

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M. Si

Pembina Tk. I
NIP.19721030 199703 1 003